

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor keuangan global memiliki peran sangat vital untuk menjaga keseimbangan dan pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam sistem ekonomi modern, perbankan menjadi tulang punggung utama karena berfungsi menjadi lembaga intermediasi keuangan untuk menjembatani aliran dana dari pihak yang mempunyai surplus likuiditas ke pihak yang membutuhkan pembiayaan (Saleem et al., 2024). Melalui aktivitas penyaluran kredit, perbankan berkontribusi besar terhadap pembiayaan konsumsi, investasi, serta pengembangan usaha di berbagai sektor (Mara et al., 2021; Soedarmono et al., 2017). Oleh karena itu, penyaluran kredit bukan hanya berperan sebagai indikator kinerja lembaga keuangan, akan tetapi mencerminkan tingkat aktivitas ekonomi di suatu negara (Lubis et al., 2019). Tingkat penyaluran kredit yang tinggi menunjukkan meningkatnya aktivitas produksi, perdagangan, dan investasi, sedangkan melemahnya penyaluran kredit dapat mengindikasikan adanya perlambatan ekonomi. Sektor perbankan Indonesia memainkan peran strategis sebagai lembaga intermediasi keuangan utama yang memfasilitasi alokasi sumber daya dari unit surplus (penabung) ke unit defisit (peminjam) melalui penyaluran kredit (Jameaba, 2018). Kredit perbankan tidak hanya mendukung konsumsi rumah tangga dan usaha kecil-menengah (UKM), tetapi juga investasi infrastruktur dan sektor riil, yang

secara keseluruhan berkontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional (Yudaruddin et al., 2024). Menurut teori intermediasi keuangan (Diamond, 1984) dikutip dalam (Fitrayansyah et al., 2024) Bank merupakan institusi keuangan yang bertugas mengumpulkan dana dari unit surplus dan memberikan ke unit defisit guna memenuhi kebutuhan pendanaan. Dengan adanya bank sebagai perantara, kesenjangan antara pemberi pinjaman dan peminjam dapat dikurangi, sehingga efisiensi ekonomi dapat tercapai.

Namun, dalam skala global, penyaluran kredit perbankan tidak terlepas dari berbagai dinamika dan ketidakpastian ekonomi dunia. Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi titik balik penting yang mengguncang stabilitas sistem keuangan internasional. Krisis tersebut bermula dari kegagalan pasar di Amerika Serikat, khususnya pada sektor *subprime mortgage*, yang kemudian menyebar ke berbagai negara melalui jalur perdagangan, investasi, dan perbankan internasional. Peristiwa tersebut menunjukkan betapa erat keterkaitan sistem keuangan antarnegara serta bagaimana ketidakseimbangan dalam penyaluran kredit dapat memicu instabilitas keuangan global (Borio & Disyatat, 2011). Pada saat krisis, banyak lembaga keuangan besar mengalami tekanan likuiditas yang berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional. Fenomena ini menegaskan bahwa pengelolaan penyaluran kredit yang sehat, hati-hati, dan berkelanjutan merupakan salah satu kunci penting dalam menjaga stabilitas ekonomi global.

Setelah melalui masa pemulihan dari krisis tersebut, pada tahun 2020 dunia kembali menghadapi guncangan besar ketika pandemi COVID-19 meluas secara global. Pandemi ini menyebabkan penurunan signifikan pada aktivitas ekonomi dunia, yang ditandai dengan terganggunya rantai pasok, menurunnya permintaan agregat, serta terbatasnya mobilitas masyarakat. Kondisi tersebut mendorong perlambatan pertumbuhan ekonomi di banyak negara dan memberikan tekanan yang cukup berat bagi sektor keuangan akibat meningkatnya risiko pembiayaan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, bank sentral di berbagai negara, termasuk Bank Indonesia, menerapkan kebijakan moneter yang bersifat ekspansif melalui penurunan suku bunga acuan serta pelonggaran likuiditas guna menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendorong penyaluran kredit perbankan (Sugandi, 2022). Namun, meskipun kebijakan moneter bersifat akomodatif, penyaluran kredit perbankan tetap mengalami hambatan akibat meningkatnya risiko dan ketidakpastian ekonomi. Situasi ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi domestik, tetapi juga sangat bergantung pada stabilitas ekonomi global dan arah kebijakan keuangan dunia.

Dalam lingkup nasional, perbankan Indonesia memegang peranan strategis dalam mendorong perekonomian. Bank menjalankan fungsi intermediasi dengan cara menghimpun dana dari masyarakat lalu diberikan kembali sebagai kredit kepada pihak yang memerlukan dana (Soedarmono et al., 2017). Berdasarkan (OJK, 2024), sampai akhir tahun 2023, penyaluran

kredit perbankan Indonesia mencapai Rp6.800 triliun atau kurang lebih 40% dari total PDB nasional. Dari total tersebut, sekitar 45% merupakan kredit modal kerja, 30% kredit konsumsi, dan 25% kredit investasi. Data tersebut mencerminkan sistem perbankan Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai sektor ekonomi, baik sektor produktif seperti industri pengolahan, perdagangan, dan konstruksi, maupun sektor konsumsi rumah tangga. Dengan demikian, penyaluran kredit perbankan menjadi indikator penting yang merefleksikan kapasitas intermediasi perbankan serta daya dorong ekonomi nasional secara keseluruhan.

Urgensi penelitian mengenai penyaluran kredit perbankan dapat dijelaskan melalui beberapa lapisan kepentingan yang saling berkaitan. Pertama, dari sisi makroekonomi, penyaluran kredit perbankan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai stabilitas dan kesehatan perekonomian nasional. Kredit perbankan berfungsi sebagai penghubung antara sektor keuangan dan sektor riil. Tingkat penyaluran kredit yang memadai memungkinkan pelaku usaha memperoleh akses pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas produksi, memperluas investasi, dan menciptakan lapangan kerja. Sebaliknya, melemahnya penyaluran kredit dapat berdampak pada perlambatan aktivitas ekonomi, penurunan daya beli masyarakat, serta berkurangnya potensi penerimaan negara (Yudaruddin et al., 2024).

Kedua, dari sisi sektoral, penyaluran kredit perbankan mencerminkan sejauh mana fungsi intermediasi perbankan berjalan secara efektif. Sektor perbankan tidak hanya berperan dalam menghimpun dana dari

masyarakat, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam menyalurkan dana tersebut ke sektor-sektor produktif. Tingkat penyaluran kredit yang seimbang dengan DPK mencerminkan bahwa sistem keuangan mampu menyalurkan likuiditas ke sektor riil secara optimal. Namun, apabila DPK meningkat tanpa diikuti oleh penyaluran kredit yang memadai, kondisi tersebut mengindikasikan adanya kelebihan likuiditas (*excess liquidity*) yang belum dimanfaatkan secara optimal (Yudaruddin et al., 2024). Situasi ini dapat menahan ekspansi aktivitas ekonomi serta menurunkan efektivitas fungsi intermediasi perbankan dalam mendukung sektor riil.

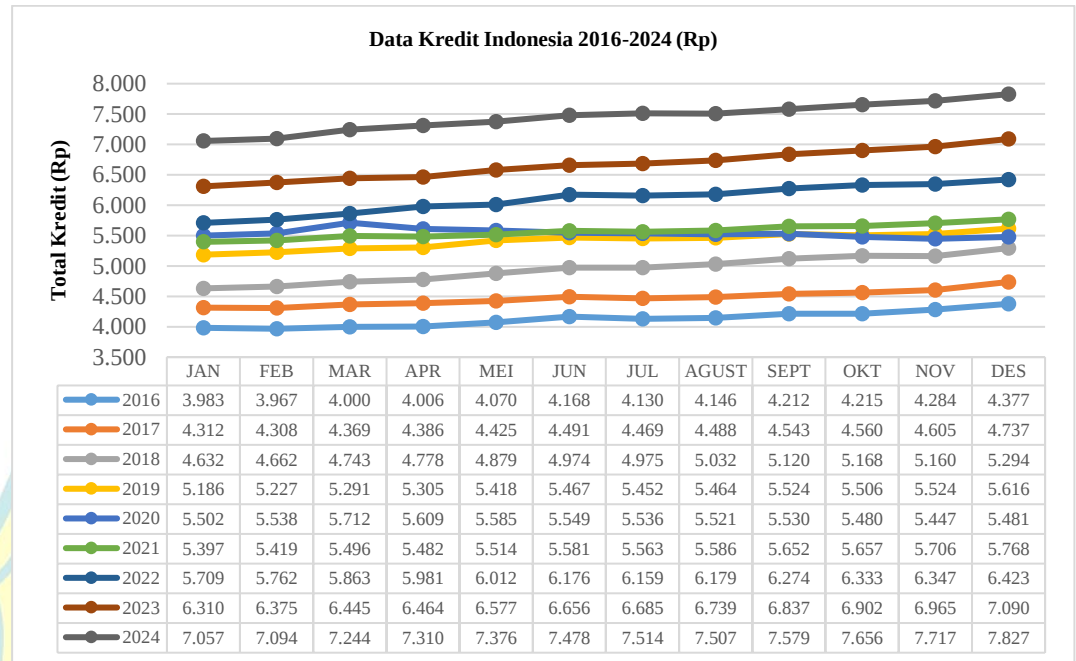
Ketiga, dari sisi kebijakan publik, penyaluran kredit perbankan menjadi salah satu fokus utama dalam pelaksanaan kebijakan moneter dan makroprudensial. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia menggunakan berbagai instrumen kebijakan, seperti *BI Rate*, rasio cadangan wajib, serta kebijakan makroprudensial untuk menjaga stabilitas harga sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi. Perubahan *BI Rate* memiliki dampak langsung terhadap biaya pinjaman, yang selanjutnya memengaruhi keputusan pembiayaan dan investasi pelaku ekonomi. Ketika suku bunga berada pada tingkat yang terlalu tinggi, permintaan dan penyaluran kredit cenderung menurun. Sebaliknya, suku bunga yang terlalu rendah berpotensi meningkatkan risiko pembiayaan dan kredit bermasalah. Oleh karena itu, pemahaman mengenai hubungan antara kebijakan moneter, likuiditas perbankan, dan penyaluran kredit perbankan menjadi penting agar kebijakan

yang diterapkan mampu mendorong aktivitas ekonomi secara optimal tanpa mengganggu stabilitas sistem keuangan.

Keempat, dari sisi akademik dan ilmiah, penelitian mengenai penyaluran kredit perbankan memiliki urgensi yang tinggi karena memberikan kontribusi empiris terhadap literatur ekonomi moneter dan perbankan, khususnya di negara berkembang. Dengan menganalisis hubungan antara variabel makroekonomi seperti IPI, *BI Rate*, dan DPK terhadap penyaluran kredit perbankan, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pola interaksi antarvariabel ekonomi pada periode 2016–2024 di Indonesia, yang mencakup fase sebelum pandemi, masa pandemi COVID-19, serta periode pemulihan ekonomi. Dari aspek teoretis, output dari studi ini diproyeksikan mampu memperkaya literatur dan pemahaman terkait jalur transmisi kebijakan moneter di sektor perbankan, utamanya dalam mengintervensi ekspansi kredit. Selain itu, kajian ini diharapkan dapat menjadi rujukan ilmiah bagi penelitian-penelitian mendatang di ranah ekonomi keuangan dan perbankan.

Periode analisis penelitian 2016-2024 dipilih karena mencakup fase transisi ekonomi Indonesia yang dinamis, mulai dari pemulihan pasca-krisis komoditas global (2016-2019), terganggu oleh pandemi COVID-19 (2020), hingga masa pemulihan setelah pandemi yang dihadapkan pada tantangan inflasi global dan ketidakpastian geopolitik (2021-2024). Situasi berubah drastis ketika dunia dihadapkan pada pandemi COVID-19 pada tahun 2020.

Dampaknya terhadap Indonesia sangat signifikan, terutama karena adanya pembatasan sosial dan gangguan rantai pasok global.



Gambar 1. 1 Penyaluran Kredit Indonesia tahun 2016-2024

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah oleh penulis, 2025)

Berdasarkan Gambar dan Grafik 1.1 penyaluran kredit perbankan Indonesia periode 2016–2024, terlihat bahwa total kredit yang disalurkan perbankan secara nominal cenderung meningkat dari tahun ke tahun, namun peningkatan tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi intermediasi yang optimal dan stabil. Secara agregat, nilai kredit meningkat dari sekitar Rp3.900 triliun pada tahun 2016 menjadi lebih dari Rp7.800 triliun pada tahun 2024, yang menunjukkan besarnya peran perbankan dalam pembiayaan perekonomian nasional. Namun demikian, pola pergerakan kredit pada grafik memperlihatkan adanya fluktuasi dan perlambatan pada periode-periode

tertentu, yang mengindikasikan adanya permasalahan struktural dan siklikal dalam penyaluran kredit perbankan.

Pada periode 2016–2019, penyaluran kredit perbankan meningkat secara relatif stabil, seiring dengan kondisi ekonomi domestik yang cukup kondusif. Meskipun demikian, peningkatan tersebut masih tergolong moderat dan belum sepenuhnya mencerminkan akselerasi pembiayaan sektor produktif. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun likuiditas perbankan tersedia, penyaluran kredit belum sepenuhnya mampu mendorong ekspansi sektor riil secara maksimal, khususnya pada sektor industri pengolahan yang menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Permasalahan penyaluran kredit semakin terlihat pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda. Grafik menunjukkan bahwa penyaluran kredit mengalami stagnasi dan perlambatan, meskipun Bank Indonesia telah menurunkan *BI Rate* dan memberikan berbagai stimulus likuiditas. Kondisi ini menunjukkan adanya pelemahan transmisi kebijakan moneter, di mana penurunan suku bunga tidak secara langsung mendorong peningkatan penyaluran kredit. Tingginya ketidakpastian ekonomi, meningkatnya risiko kredit, serta kehati-hatian perbankan dalam menjaga kualitas aset menyebabkan dana yang tersedia di perbankan tidak sepenuhnya tersalurkan ke sektor riil.

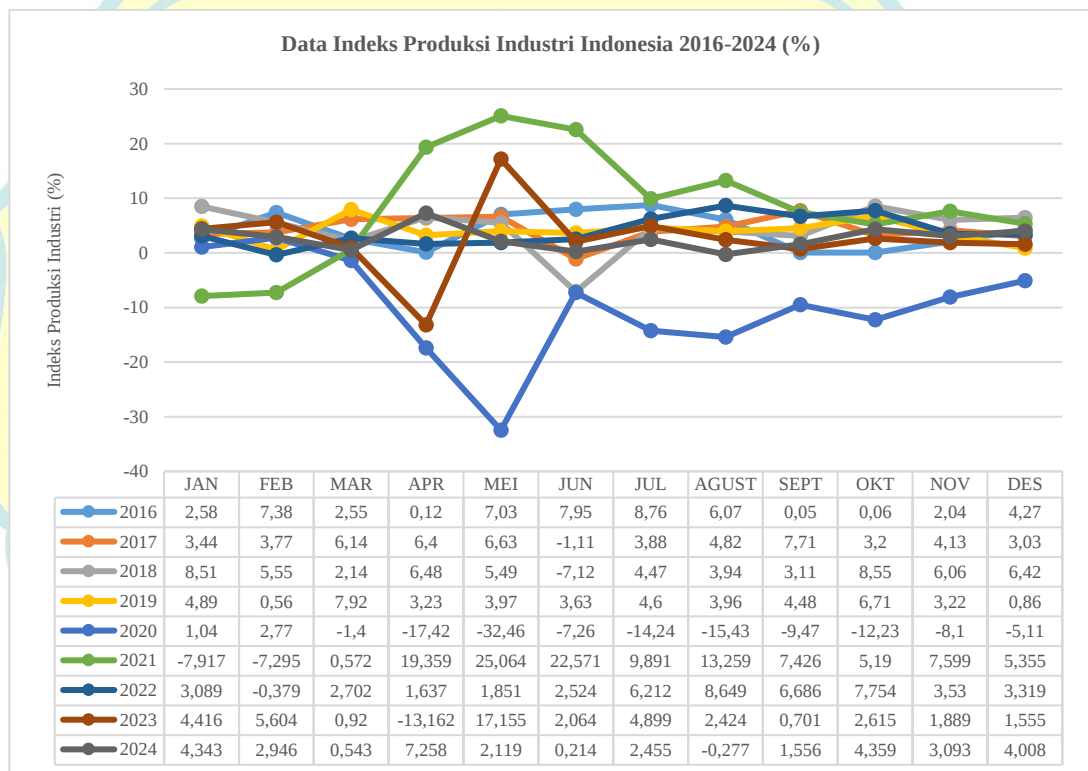
Pada periode 2021–2022, meskipun perekonomian mulai pulih, penyaluran kredit belum sepenuhnya kembali ke jalur optimal. Grafik memperlihatkan bahwa peningkatan kredit terjadi secara bertahap dan relatif

lambat. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peningkatan DPK dengan kemampuan perbankan dalam menyalurkan kredit, sehingga berpotensi menimbulkan kondisi *excess liquidity*. Likuiditas yang berlebihan namun tidak tersalurkan secara efektif dapat mengurangi fungsi intermediasi perbankan dan menahan laju pemulihan ekonomi.

Selanjutnya, pada periode 2023–2024, penyaluran kredit kembali menunjukkan peningkatan yang lebih kuat dan mencapai level tertinggi selama periode pengamatan. Namun demikian, peningkatan ini juga diiringi dengan tantangan baru, terutama terkait dengan kenaikan suku bunga global dan penyesuaian kebijakan moneter domestik. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan biaya pinjaman dan menekan permintaan kredit, khususnya dari sektor usaha yang sensitif terhadap perubahan suku bunga. Dengan demikian, meskipun secara nominal penyaluran kredit meningkat, keberlanjutan dan kualitas penyaluran kredit tetap menjadi isu penting yang perlu dicermati.

Secara keseluruhan, grafik penyaluran kredit perbankan Indonesia periode 2016–2024 menunjukkan bahwa tingginya nominal kredit yang disalurkan belum tentu mencerminkan efektivitas fungsi intermediasi perbankan secara optimal. Fluktuasi dan perlambatan penyaluran kredit pada periode tertentu mengindikasikan bahwa penyaluran kredit dipengaruhi oleh berbagai faktor. Untuk memahami lebih lanjut faktor fundamental yang memengaruhi dinamika penyaluran kredit perbankan tersebut, khususnya dari sisi sektor riil, diperlukan analisis terhadap kinerja aktivitas produksi

nasional. Salah satu indikator yang merepresentasikan kondisi sektor riil adalah IPI, yang mencerminkan tingkat output dan aktivitas industri pengolahan. Menurut CEIC Data (2020), IPI Indonesia mengalami kontraksi hingga -17.42% pada April 2020, menandakan terhentinya sebagian besar aktivitas industri akibat pembatasan mobilitas. Penurunan ini berdampak langsung terhadap kebutuhan pembiayaan sektor riil, karena pelaku usaha menunda ekspansi dan mengurangi penggunaan fasilitas kredit.



Gambar 1. 2 Indeks Produksi Industri Indonesia tahun 2016-2024

Sumber: CEIC Data (diolah oleh penulis, 2025)

Berdasarkan Gambar dan Grafik 1.2 Indeks Produksi Industri (IPI) Indonesia periode 2016–2024, terlihat bahwa kinerja sektor industri mengalami fluktuasi yang cukup tajam, terutama pada periode 2020–2021, yang mencerminkan dampak signifikan pandemi COVID-19 terhadap aktivitas

produksi nasional. Secara teoritis, peningkatan aktivitas industri yang tercermin dari kenaikan IPI seharusnya diikuti oleh peningkatan permintaan dan penyaluran kredit perbankan, karena sektor industri membutuhkan pembiayaan untuk mendukung proses produksi dan ekspansi usaha. Namun, grafik menunjukkan bahwa hubungan antara IPI dan penyaluran kredit tidak selalu bergerak searah, khususnya pada masa krisis dan awal pemulihan ekonomi.

Pada tahun 2020, IPI mengalami kontraksi yang sangat tajam. Grafik memperlihatkan bahwa pada bulan Mei 2020, IPI terjun hingga sekitar -32,46, yang menunjukkan terhentinya sebagian besar aktivitas industri akibat pembatasan mobilitas dan gangguan rantai pasok. Kondisi ini sesuai dengan teori ekonomi, di mana penurunan aktivitas sektor riil seharusnya menekan permintaan kredit. Namun, permasalahan muncul ketika penyaluran kredit perbankan pada periode yang sama tidak mengalami kontraksi sebesar penurunan IPI, melainkan cenderung stagnan dan masih berada pada level yang relatif tinggi. Hal ini mengindikasikan adanya ketidaksinkronan antara kondisi sektor riil dan respons penyaluran kredit perbankan, yang dapat disebabkan oleh kebijakan restrukturisasi kredit, stimulus likuiditas, serta sikap kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan kredit baru.

Memasuki tahun 2021, grafik menunjukkan bahwa IPI mulai pulih dan bahkan mencatat lonjakan signifikan pada beberapa bulan, seperti pada Mei–Juni 2021, ketika IPI mencapai lebih dari 20%. Secara teoritis, lonjakan aktivitas industri ini seharusnya diikuti oleh peningkatan penyaluran kredit

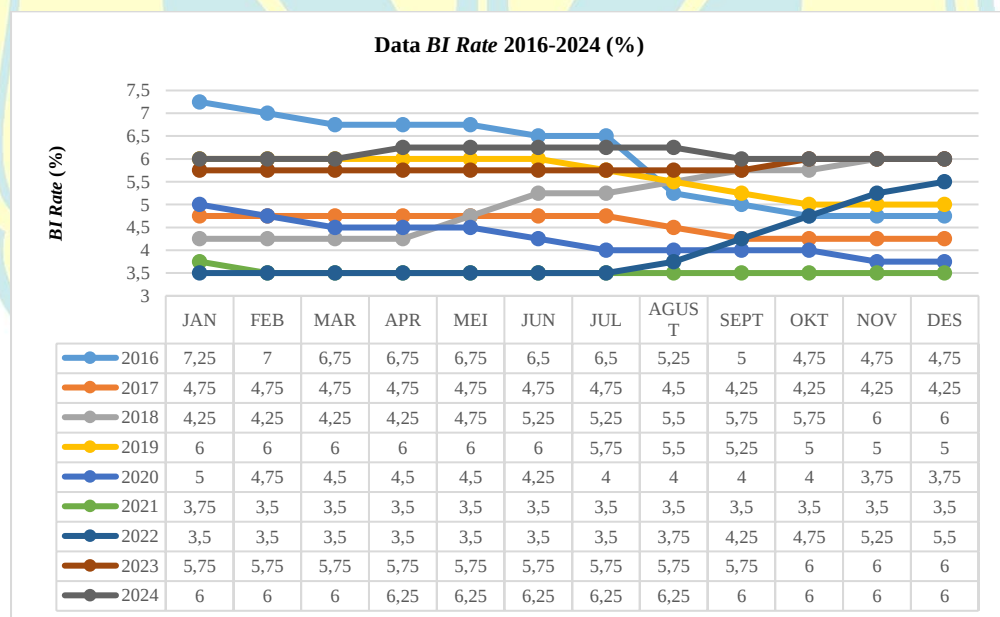
yang kuat sebagai respons atas meningkatnya kebutuhan pembiayaan sektor usaha. Namun, data menunjukkan bahwa penyaluran kredit belum meningkat secara proporsional terhadap lonjakan IPI, dan cenderung tumbuh lebih lambat. Kondisi ini mencerminkan adanya transmisi yang tidak optimal dari pemulihan sektor riil ke sektor perbankan, di mana dunia usaha mulai memproduksi kembali tetapi belum sepenuhnya meningkatkan permintaan kredit, atau perbankan masih menerapkan standar penyaluran kredit yang ketat akibat risiko pembiayaan pasca pandemi.

Pada periode 2022–2024, IPI relatif stabil dengan fluktuasi yang lebih moderat, mencerminkan proses normalisasi aktivitas industri. Namun demikian, pergerakan IPI yang cenderung stabil tersebut tidak selalu diikuti oleh perubahan penyaluran kredit yang searah dan konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan tidak hanya ditentukan oleh kinerja sektor industri, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti kebijakan suku bunga, preferensi risiko perbankan, serta kondisi likuiditas. Dengan kata lain, meskipun sektor industri menunjukkan pemulihan, fungsi intermediasi perbankan belum sepenuhnya responsif terhadap dinamika sektor riil.

Secara keseluruhan, grafik Indeks Produksi Industri Indonesia periode 2016–2024 mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara teori dan kondisi empiris, di mana peningkatan aktivitas industri tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyaluran kredit perbankan secara sebanding. Fenomena ini menunjukkan adanya gap antara sektor riil dan sektor keuangan, yang menandakan bahwa efektivitas fungsi intermediasi perbankan masih

menghadapi berbagai kendala struktural dan siklikal. Oleh karena itu, kondisi ini memperkuat urgensi penelitian untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana Indeks Produksi Industri memengaruhi penyaluran kredit perbankan di Indonesia, khususnya ketika dikaitkan dengan peran kebijakan moneter dan likuiditas perbankan dalam periode ketidakpastian ekonomi.

Selain aktivitas industri, kebijakan moneter juga berperan penting dalam memengaruhi kondisi perbankan. Untuk menjaga stabilitas keuangan selama pandemi, Bank Indonesia melakukan penurunan *BI Rate* secara bertahap dari 5,00% pada Januari 2020 menjadi 3,50% pada Maret 2021. Perkembangan *BI Rate* dan penyaluran kredit selama periode ini dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut.



Gambar 1. 3 BI Rate tahun 2016-2024

Sumber: Bank Indonesia, BPS (diolah oleh penulis, 2025)

Berdasarkan Gambar dan Grafik 1.3 *BI Rate* dan penyaluran kredit perbankan periode 2016–2024, khususnya pada periode Januari 2020 hingga

Desember 2021, terlihat adanya dinamika yang kuat akibat pandemi COVID-19 dan respons kebijakan moneter Bank Indonesia. Secara teoritis, penurunan *BI Rate* diharapkan dapat menurunkan biaya pinjaman dan mendorong peningkatan penyaluran kredit perbankan. Namun, data empiris pada grafik menunjukkan bahwa penurunan *BI Rate* tidak secara langsung diikuti oleh peningkatan penyaluran kredit, terutama pada masa awal pandemi.

Pada awal tahun 2020, *BI Rate* masih berada pada level 5,00%, sementara penyaluran kredit perbankan berada pada level relatif tinggi. Seiring memburuknya kondisi ekonomi akibat pandemi, Bank Indonesia menurunkan *BI Rate* secara bertahap hingga mencapai 3,75% pada akhir 2020. Meskipun kebijakan ini bersifat sangat akomodatif, grafik menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan justru mengalami perlambatan dan cenderung stagnan, tanpa peningkatan yang signifikan. Kondisi ini mencerminkan adanya pelemahan transmisi kebijakan moneter, di mana penurunan suku bunga belum mampu mendorong ekspansi kredit secara efektif akibat meningkatnya risiko usaha, ketidakpastian ekonomi, serta kehati-hatian perbankan dalam menyalurkan pembiayaan baru.

Memasuki tahun 2021, *BI Rate* kembali diturunkan dan dipertahankan pada level rendah sebesar 3,50% untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional. Secara empiris, grafik menunjukkan bahwa penyaluran kredit mulai mengalami peningkatan secara bertahap sepanjang tahun 2021. Namun demikian, peningkatan tersebut bersifat lambat dan tidak sebanding dengan tingkat pelonggaran suku bunga yang diterapkan. Hal ini menunjukkan bahwa

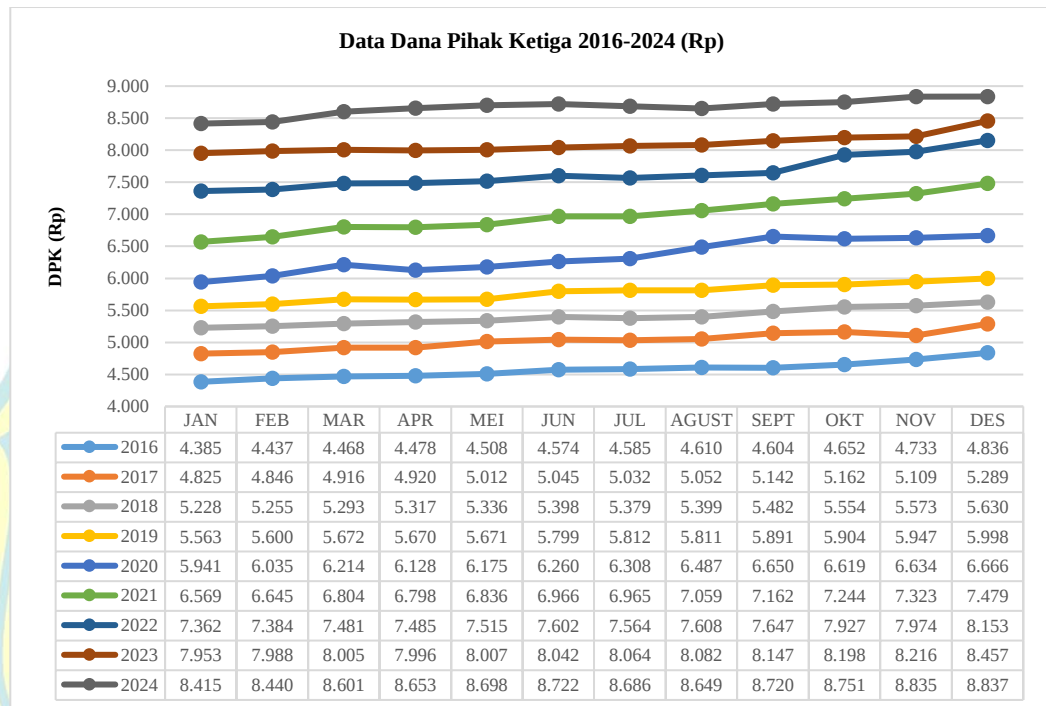
meskipun biaya pinjaman telah ditekan serendah mungkin, permintaan kredit dari dunia usaha belum pulih sepenuhnya, dan perbankan masih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi potensi risiko kredit bermasalah.

Pada akhir periode pengamatan, yaitu Desember 2021, penyaluran kredit perbankan mulai menunjukkan perbaikan yang lebih nyata seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi domestik dan meredanya ketidakpastian. Namun demikian, kondisi ini sekaligus menegaskan bahwa kebijakan suku bunga saja tidak cukup untuk mendorong penyaluran kredit secara optimal, khususnya dalam situasi krisis. Dengan kata lain, hubungan negatif antara *BI Rate* dan penyaluran kredit yang dijelaskan dalam teori ekonomi tidak sepenuhnya tercermin dalam data empiris pada periode pandemi.

Secara keseluruhan, grafik *BI Rate* dan penyaluran kredit perbankan periode 2016–2024 mengindikasikan adanya ketidaksesuaian antara teori dan fakta empiris, di mana penurunan *BI Rate* tidak selalu diikuti oleh peningkatan penyaluran kredit secara langsung dan proporsional. Fenomena ini menunjukkan bahwa penyaluran kredit perbankan bukan hanya dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga, melainkan juga oleh faktor lain seperti kondisi sektor riil, persepsi risiko, serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Faktor lain yang juga memiliki peranan penting terhadap penyaluran kredit perbankan adalah Dana Pihak Ketiga (DPK). DPK merepresentasikan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan sekaligus menjadi sumber utama dana yang digunakan bank dalam menyalurkan kredit

(Soedarmono et al., 2017). Selama pandemi, perilaku masyarakat yang lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi menyebabkan peningkatan simpanan di bank (Yudaruddin et al., 2024). Perkembangan antara DPK dan Penyaluran Kredit dapat dilihat pada gambar 1.4 berikut.



Gambar 1. 4 Dana Pihak Ketiga Indonesia tahun 2016-2024

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (diolah oleh penulis, 2025)

Berdasarkan Gambar dan Grafik 1.4 Dana Pihak Ketiga (DPK) periode 2016–2024, khususnya pada periode Januari 2020 hingga Desember 2021, terlihat bahwa DPK perbankan Indonesia mengalami peningkatan yang relatif konsisten, bahkan pada saat perekonomian berada dalam tekanan akibat pandemi COVID-19. Pada awal tahun 2020, DPK tercatat sebesar Rp5.941,772 triliun, kemudian terus meningkat menjadi Rp6.128,090 triliun pada April 2020, dan mencapai Rp6.666,390 triliun pada Desember 2020. Peningkatan

DPK ini mencerminkan meningkatnya simpanan masyarakat di perbankan, yang antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya preferensi menabung, terbatasnya konsumsi, serta sikap kehati-hatian masyarakat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Namun demikian, peningkatan DPK tersebut tidak diikuti oleh peningkatan penyaluran kredit perbankan secara sebanding. Pada periode yang sama, penyaluran kredit cenderung bergerak fluktuatif dan relatif tertahan, berada pada kisaran 5.609,903, meskipun likuiditas perbankan semakin melimpah. Kondisi ini mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara kemampuan perbankan dalam menghimpun dana dan efektivitas penyaluran dana tersebut ke sektor riil. Secara teoritis, peningkatan DPK seharusnya memperbesar kapasitas bank dalam menyalurkan kredit. Namun, data empiris justru menunjukkan bahwa likuiditas yang meningkat belum sepenuhnya dikonversi menjadi pembiayaan produktif.

Pada tahun 2021, tren peningkatan DPK semakin menguat, meningkat dari Rp6.804,564 triliun pada Maret 2021 menjadi Rp7.479,463 triliun pada Desember 2021, yang mencerminkan kondisi likuiditas perbankan yang semakin longgar. Sementara itu, penyaluran kredit perbankan memang mulai menunjukkan perbaikan secara bertahap, meningkat dari 5.496,419 pada Maret menjadi 5.768,585 pada Desember 2021. Namun, laju peningkatan kredit tersebut masih relatif lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan DPK, sehingga kesenjangan antara dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan masih tetap terlihat.

Fenomena ini menegaskan adanya permasalahan struktural dalam fungsi intermediasi perbankan, di mana peningkatan DPK tidak secara otomatis diikuti oleh peningkatan penyaluran kredit. Kondisi *excess liquidity* yang terjadi berpotensi menurunkan efektivitas perbankan dalam mendorong pertumbuhan sektor riil, serta mengindikasikan adanya faktor lain yang menahan penyaluran kredit, seperti persepsi risiko, kualitas permintaan kredit, dan kebijakan manajemen risiko perbankan pasca-pandemi.

Dengan demikian, meskipun secara deskriptif DPK menunjukkan tren peningkatan yang stabil, hubungan antara DPK dan penyaluran kredit perbankan tidak bersifat mekanis dan pasti, sebagaimana diasumsikan dalam teori intermediasi keuangan. Ketidaksesuaian antara teori dan fakta empiris ini memperkuat urgensi penelitian untuk mengkaji secara lebih mendalam pengaruh DPK terhadap penyaluran kredit perbankan, khususnya dalam konteks periode krisis dan pemulihan ekonomi, sehingga riset ini bukan hanya bersifat deskriptif, melainkan memiliki kontribusi analitis dalam menjelaskan efektivitas fungsi intermediasi perbankan di Indonesia.

Dengan melihat perjalanan tersebut, dapat disimpulkan bahwa IPI, *BI Rate*, dan DPK ialah tiga variabel makroekonomi yang mempunyai keterkaitan erat dengan dinamika penyaluran kredit perbankan. Hubungan antarvariabel tersebut tidak selalu bersifat linier, karena dipengaruhi oleh kondisi eksternal, ekspektasi pelaku ekonomi, serta arah kebijakan pemerintah. Sejumlah studi terdahulu telah dilakukan supaya menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penyaluran kredit perbankan, namun menunjukkan hasil yang

beragam. Seperti, penelitian yang dibuat oleh Pertiwi (2021) menemukan bahwa IPI memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kredit, yang sejalan dengan temuan Awalia (2022) mengenai peran positif Dana Pihak Ketiga (DPK) dalam memperkuat likuiditas bank untuk menyalurkan kredit. Namun di sisi lain, penelitian oleh Ridlwan (2020) justru menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga acuan (*BI Rate*) sering kali direspons secara lambat oleh perbankan sehingga tidak selalu menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan dalam jangka pendek. Selain didasarkan pada fenomena empiris yang terjadi pada perkembangan penyaluran kredit, IPI, *BI Rate*, dan DPK di Indonesia, penelitian ini juga didorong oleh adanya kesenjangan penelitian dari hasil-hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan temuan yang tidak konsisten.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya berfokus pada pertumbuhan kredit atau menggunakan data tahunan, penelitian ini secara khusus menitikberatkan pada penyaluran kredit perbankan sebagai fungsi intermediasi riil dengan menggunakan data bulanan, sehingga mampu menangkap dinamika jangka pendek serta respon perbankan terhadap perubahan kondisi makroekonomi secara lebih akurat. Selain itu, penelitian ini mencakup periode 2016–2024 yang mencerminkan berbagai fase perekonomian penting, termasuk periode normal, guncangan pandemi COVID-19, hingga fase pemulihan ekonomi, yang relatif belum banyak dikaji secara komprehensif dalam satu kerangka analisis. Atas dasar tersebut, studi ini krusial untuk dilaksanakan guna membedah dampak Indeks Produksi

Industri (IPI), BI Rate, serta Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap volume penyaluran kredit perbankan di Indonesia sepanjang kurun waktu 2016–2024.

Studi ini memanfaatkan data sekunder berbasis bulanan yang bersumber dari Bank Indonesia, OJK, CEIC Data, serta BPS. Output dari kajian ini diproyeksikan mampu menyajikan bukti empiris yang kontributif bagi para otoritas dalam menyusun regulasi moneter dan perbankan yang tepat sasaran, terutama dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi keuangan serta memacu ekspansi kredit yang sehat demi menopang pertumbuhan ekonomi domestik.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berlandaskan pada penjelasan latar belakang serta batasan masalah yang telah dipaparkan di atas, guna memberikan kejelasan mengenai arah dan cakupan kajian, rumusan masalah dalam penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Bagaimana Indeks Produksi Industri (IPI) memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan Indonesia periode 2016-2024?
2. Bagaimana *BI Rate* memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan Indonesia periode 2016-2024?
3. Bagaimana Dana Pihak Ketiga (DPK) memiliki pengaruh signifikan terhadap penyaluran kredit perbankan Indonesia periode 2016-2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada penjelasan latar belakang serta rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, sasaran utama dari penelitian ini ditetapkan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Indeks Produksi Industri (IPI) terhadap penyaluran kredit perbankan Indonesia periode 2016-2024.
2. Untuk menganalisis pengaruh *BI Rate* terhadap penyaluran kredit perbankan Indonesia periode 2016-2024.
3. Untuk menganalisis pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap penyaluran kredit perbankan Indonesia periode 2016-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Riset ini diharapkan bisa memberikan kontribusi baik secara teoritis ataupun praktis, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, studi ini memperkaya literatur ekonomi moneter dan perbankan dengan bukti empiris terkini mengenai hubungan antar variabel makroekonomi menggunakan data bulanan, yang dapat dijadikan referensi bagi studi lanjutan dalam bidang ekonometrika keuangan.
2. Secara praktis, hasil studi ditujukan dapat memberikan rekomendasi bagi Bank Indonesia dan OJK dalam merumuskan kebijakan suku bunga dan pengawasan likuiditas perbankan untuk mendukung penyaluran kredit yang berkelanjutan.
3. Bagi pelaku industri dan perbankan, penelitian ini dapat menjadi dasar strategi peningkatan penyaluran kredit di tengah fluktuasi Indeks Produksi Industri (IPI) dan Dana Pihak Ketiga (DPK), serta berkontribusi pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi nasional.